



KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PERIODE TAHUN 2012 – 2016

Sesilia Endang Kahyati
STIA Bina Banua Banjarmasin
sesiliaendang77@gmail.com

Irawanto
STIA Bina Banua Banjarmasin
irawanto@stiabinabanuabjm.ac.id

Akhmad Abdurrahman
STIA Bina Banua Banjarmasin
akhmad.abdurrahman@stiabinabanuabjm.ac.id

Abstrak: Data were collected through interviews and documentation. The result of the research indicates that: 1) The contribution of Local Original Revenue (PAD) of Kapuas Regency which is sourced from local tax to regional finance of Kapuas Regency of 2012-2016 is 61,5% which means that local taxes give high contribution to regional finance of Kapuas Regency. 2) Local Own Revenue Contribution (PAD) of Kapuas Regency which is sourced from regional retribution to regional finance of Regency of Kapuas in 2012-2016 amounted to 82,8% which means that local retribution gives very high contribution to the regional finance of Kapuas Regency. 3) Local Original Revenue Contribution (PAD) of Kapuas Regency which is sourced from the Regional Wealth Management Result separated to Kapuas District's finance in 2012-2016 amounted to 87,6% which means that the Separate Regional Property Management Outcome contributes very high to finance Kapuas District, and 4) Local Own Revenue Contribution (PAD) of Kapuas Regency originating from Other Legitimate PAD to the regional finance of Kapuas Regency in 2012-2016 on average 82,8% which means that other PAD Sah has a very high contribution to the regional finance of Kapuas Regency.

Keywords: Local Original Income, Local Tax, Levy, Regional Finance

Abstak: Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari pajak daerah terhadap keuangan daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016 sebesar 61,5% yang berarti bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas. 2) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari retribusi daerah terhadap keuangan daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016 sebesar 82,8 % yang berarti bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi yang sangat tinggi di terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas. 3) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap keuangan daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016 sebesar 87,6% yang berarti bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas, dan 4) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah terhadap keuangan daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016 rata-rata sebesar 82,8% yang berarti bahwa Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi, Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan Daerah dalam melaksanakan otonomi Daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi Daerah membawa dampak positif bagi Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan Daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah Daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari Daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi Daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Halim (2014:67), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli Daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dicantumkan salah satu dari sumber-sumber pendapatan Daerah adalah Pendapatan asli Daerah yang terdiri dari: a. Hasil pajak Daerah, b Hasil retribusi Daerah, c. Hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah dan, d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Dalam pelaksanaan otonomi Daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli Daerah memiliki peranan lebih penting dibandingkan dengan

sumber-sumber diluar pendapatan asli Daerah, karena pendapatan asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif Daerah.

Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah Daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan Daerahnya. Sementara sumber keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, umumnya sudah ditentukan untuk pembiayaan tertentu yang sifatnya mengikat. Oleh karena itu sangat wajar jika pemerintah Daerah berusaha bagaimana memperoleh PAD semaksimal mungkin agar bisa memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya demi perkembangan dan pembangunan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari berbagai sumber PAD khususnya untuk tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki tingkat pencapaian atau realisasi yang berbeda-beda. Setiap tahun PAD Kabupaten Kapuas memiliki tingkat pencapaian yang berbeda-beda dan masing-masing Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang berbeda terhadap keuangan Daerah Kabupaten Kapuas. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas terhadap Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,94%, sedangkan kontribusi yang paling rendah adalah pada tahun 2013 yaitu hanya 4,07% saja. Artinya rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas terhadap keuangan Daerah selama 5 (lima) tahun adalah 5,18% saja. Kontribusi tersebut dinilai masih belum optimal karena belum mencapai 10%.

Fenomena diatas secara tidak langsung menjelaskan bahwa perolehan Kabupaten Kapuas dari aspek hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan masih belum maksimal sehingga memerlukan upaya yang lebih keras khususnya dalam hal menggali potensi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan agar bisa lebih optimal, sehingga diharapkan nantinya mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan Daerah.

Bertolak dari uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2012 – 2016 berdasarkan unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

LANDASAN TEORI

Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan Daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 maka berbagai prinsip dasar yang ada dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kembali dipertegas dan menjadi acuan dalam pengalihan keuangan

Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tiga tahapan yaitu: Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan serta Pertanggungjawaban.

Menurut Jaya (2015: 11) keuangan Daerah adalah seluruh tatanan perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran Daerah yang meliputi pendapatan dan belanja Daerah.

Menurut Halim (2014: 24), kinerja keuangan pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan Daerah dalam menjalankan otonomi Daerah. Selanjutnya pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Halim (2014: 101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak Daerah, retribusi

Daerah, hasil perusahaan milih Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Nurlan (2013:135) mengemukakan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah. Sumber-sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-Lain PAD yang sah

Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Daerah memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap keuangan Daerah Kabupaten Kapuas.

- 2) Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap keuangan Daerah Kabupaten Kapuas
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap keuangan Daerah Kabupaten Kapuas
- 4) Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap keuangan Daerah Kabupaten Kapuas

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran atau mixed methods. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif, karena dalam penelitian ini terdapat deskripsi atau gambaran mengenai variabel yang diteliti dan terdapat pula pemaparan data-data dalam bentuk angka yang bertujuan membuktikan sebuah hipotesis.

Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan Kabupaten Kapuas. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan kabupaten Kapuas periode tahun 2012 hingga tahun 2016.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Data dalam penelitian ini dianalisis melalui statistik deskriptif dan menggunakan analisis korelasi dan koefisien determinasi. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui uji t dan uji F.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Secara astronomis, Kabupaten Kapuas terletak antara 0o8'48" – 3o27'00" Lintang Selatan dan 112o2'36" – 114o44'00" Bujur Timur. Bata wilayah Kabupaten Kapuas meliputi :

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selayan dan Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Barito Kuala)
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Tahun 2016 sebanyak 348.049 orang yang terdiri dari 177.648 oarang penduduk laki-laki atau 51,04% dan 170.401 orang penduduk perempuan atau 48,96%. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kapuas rata-rata sebanyak 23 orang per kilometer persegi. Kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Selat yaitu rata-rata 537 orang per kilometer persegi dan yang terjarang penduduknya adalah di Kecamatan Mandau Talawang yaitu rata-rata 4 orang perkilometer persegi.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Keuangan Daerah

Nilai koefisien korelasi (R) antara variabel pajak daerah (X1) dengan variabel keuangan daerah (Y) Kabupaten Kapuas adalah sebesar 0,784. Apabila di konfirmasikan ke dalam tabel interpretasi nilai koefisien korelasi (R) (tabel 3.3), maka nilai 0,784 masuk kedalam kategori “kuat”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Pajak Daerah dengan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas.

Koefisien determinasi (r^2) dapat diketahui dengan mengkuadratkan nilai korelasi (R) variabel pajak daerah (X1) dengan variabel Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas. Dengan demikian, maka:

$$KD = R^2 = 0,784^2 = 0,615$$

Berdasarkan pada perhitungan diatas, diperoleh nilai koefisien determinan sebesar 0,615. Hal ini berarti bahwa variabel Pajak Daerah (X1) memberikan kontribusi yang positif sebesar 61,5% terhadap variabel Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas, sedangkan sisanya yaitu 38,5% berasal dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Keuangan Daerah

Nilai koefisien korelasi (R) antara variabel retribusi daerah (X2) dengan variabel keuangan daerah (Y) Kabupaten Kapuas adalah sebesar 0,910. Apabila di konfirmasikan ke dalam tabel interpretasi nilai koefisien korelasi (R) (tabel 3.3), maka nilai 0,910 masuk kedalam kategori “sangat kuat”. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Retribusi Daerah dengan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas.

Koefisien determinasi (r^2) dapat diketahui dengan mengkuadratkan nilai korelasi (R) variabel retribusi daerah (X_2) dengan variabel Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas. Dengan demikian, maka:

$$KD = R^2 = 0,9102 = 0,828$$

Berdasarkan pada perhitungan diatas, diperoleh nilai koefisien determinan sebesar 0,828. Hal ini berarti bahwa variabel retribusi Daerah (X_2) memberikan kontribusi yang positif sebesar 82,8% terhadap variabel Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas, sedangkan sisanya yaitu 17,2% berasal dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Keuangan Daerah

Nilai koefisien korelasi (R) antara variabel Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X_3) dengan variabel keuangan daerah (Y) Kabupaten Kapuas adalah sebesar 0,936. Apabila di konfirmasikan ke dalam tabel interpretasi nilai koefisien korelasi (R) (tabel 3.3), maka nilai 0,936 masuk kedalam kategori “sangat kuat”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas.

Koefisien determinasi (r^2) dapat diketahui dengan mengkuadratkan nilai korelasi (R) variabel Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X_3) dengan variabel Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas. Dengan demikian, maka:

$$KD = R^2 = 0,9362 = 0,876$$

Berdasarkan pada perhitungan diatas, diperoleh nilai koefisien determinan sebesar 0,876. Hal ini berarti bahwa variabel Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X_3) memberikan kontribusi yang positif sebesar 87,6% terhadap variabel Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas, sedangkan sisanya yaitu 12,4% berasal dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Keuangan Daerah

Nilai koefisien korelasi (R) antara variabel Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X_4) dengan variabel keuangan daerah (Y) Kabupaten Kapuas adalah sebesar 0,910. Apabila di konfirmasikan ke dalam tabel interpretasi nilai koefisien korelasi (R) (tabel 3.3), maka nilai 0,910 masuk kedalam kategori “sangat kuat”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas.

Koefisien determinasi (r^2) dapat diketahui dengan mengkuadratkan nilai korelasi (R) variabel Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X_4) dengan variabel Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas. Dengan demikian, maka:

$$KD = R^2 = 0,9102 = 0,828$$

Berdasarkan pda perhitungan diatas, diperoleh nilai koefisien determinan sebesar 0,828. Hal ini berarti bahwa variabel Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X4) memberikan kontribusi yang positif sebesar 82,8% terhadap variabel Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas, sedangkan sisanya yaitu 17,2% berasal dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Hipotesis

- 1) Variabel Pajak Daerah (X1), nilai t hitung sebesar 2,976 sedangkan t tabel sebesar 2,446 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($0,222 < 2,446$) atau $\text{sig } t < 5\%$ ($0,846 > 0,05$), maka H1 ditolak, artinya tidak terdapat kontribusi yang signifikan dari variabel Pajak Daerah (X1) terhadap Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas.
- 2) Variabel Retribusi Daerah (X2), nilai t hitung sebesar 0,502 sedangkan t tabel sebesar 2,446 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($0,502 < 2,446$) atau $\text{sig } t < 5\%$ ($0,665 > 0,05$), maka H2 ditolak, artinya tidak terdapat kontribusi yang signifikan dari variabel Retribusi Daerah (X2) terhadap Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas.
- 3) Variabel Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3), nilai t hitung sebesar 7,006 sedangkan t tabel sebesar 2,446 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($7,006 > 2,446$) atau $\text{sig } t < 5\%$ ($0,000 < 0,05$), maka H3 diterima, artinya terdapat kontribusi yang signifikan dari variabel Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) terhadap Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas.

4) Variabel Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X4), nilai t hitung sebesar 4,780 sedangkan t tabel sebesar 2,446 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena t hitung > t tabel ($4,780 > 2,446$) atau $\text{sig } t < 5\%$ ($0,000 < 0,05$), maka H_4 diterima, artinya terdapat kontribusi yang signifikan dari variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X4) terhadap Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas.

PEMBAHASAN

Kontribusi pajak Daerah terhadap keuangan Daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016

Hasil analisis secara kuantitatif menunjukkan bahwa pajak daerah Kabupaten Kapuas untuk periode tahun 2012 hingga tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 61,5% terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas.

Pajak Daerah dapat diketahui dari nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada pos pajak Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas pada Tahun Anggaran 2012 – 2016.

Hasil analisis secara kualitatif menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Kapuas dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami turun naik. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Kapuas yang paling tinggi adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 18.654.680.289, sedangkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Kapuas yang paling rendah adalah pada tahun 2012 yaitu hanya Rp. 6.042.224.868. Adapun total penerimaan pajak daerah Kabupaten Kapuas untuk periode 2012 hingga 2016 adalah sebesar Rp. 59.901.547.328. Pada tahun 2013

terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 47,98% dari tahun 2012, pada tahun 2014 penerimaan pajak daerah juga mengalami kenaikan dari tahun 2013 yaitu sebesar 39.40%, begitu juga pada tahun 2014 yang mengalami kenaikan sebesar 49,67%. Namun pada tahun 2016 terjadi penurunan penerimaan pajak daerah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 26,02%.

Persentasi realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari aspek Pajak Daerah yang tertinggi adalah pada tahun 2013 yaitu mencapai 132,64%, sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2015 yaitu hanya mencapai 84,55% dari anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada tabel 5.2 diatas dapat diketahui bahwa 2012 dan tahun 2015 realisasi dari pajak daerah Kabupaten Kapuas tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan karena pada tahun 2012 hanya mampu mencapai 87,63% , dan untuk tahun 2015 hanya mampu direalisasikan sebesar 84,55%. Sedangkan untuk tahun 2016 realisasi penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari aspek Pajak Daerah mampu melewati target karena mencapai 104,23%.

Pendapatan Kabupaten Kapuas selalu mengalami peningkatan khususnya untuk periode tahun 2012 hingga tahun 2016. Pada tahun 2012 pendapatan Kabupaten Kapuas adalah sebesar Rp. 1.004.325.821.550,85, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 127.994.203.253,89, tahun 2014 kembali meningkat menjadi Rp 1.246.069.756.213. pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan menjadi Rp 1.499.665.182.483,29 dan pada tahun 2016 jumlah pendapatan Kabupaten Kapuas adalah sebesar Rp 1.715.688.786.098,67. Pada gambar 5.3 tersebut juga dapat diketahui bahwa pendapatan Kabupaten Kapuas untuk periode tahun 2012

hingga tahun 2016 yang tertinggi adalah pada tahun 2016, sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2012.

Persentasi realisasi pendapatan Kabupaten Kapuas periode 2012 hingga 2016 mengalami turun naik. Pada tahun 2012 realisasi pendapatan Kabupaten Kapuas mampu mencapai angka 102,90%, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan karena hanya mampu terealisasi sebesar 98,91%, kemudian pada tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan karena mampu terealisasi sebesar 99,07% dan pada tahun 2015 juga mampu terealisasi sebesar 99,39% dan pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Kabupaten Kapuas mampu direalisasikan dengan sangat baik karena mampu melebihi target yang dianggarkan dan terealisasi sebesar 105,74%.

Selama tahun 2012 hingga tahun 2016, pajak daerah memberikan kontribusi yang bervariasi terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas, Kontribusi pajak daerah terhadap keuangan daerah selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 adalah bervariasi. Kontribusi tertinggi berada pada tahun 2013, yaitu mencapai 1,24% dan kontribusi terendah adalah pada tahun 2012, yaitu hanya 0,6%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cherrya Dhia Wenny, 2011 dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah STIA MDP” dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah tidak memberikan pengaruh dominan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kontribusi retribusi Daerah terhadap keuangan Daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016.

Analisis secara kualitatif menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari retribusi daerah Kabupaten Kapuas mengalami penurunan dari tahun ketahun. Penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kapuas yang paling tinggi adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 14.703.942.522, sedangkan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kapuas yang paling rendah adalah pada tahun 2016 yaitu hanya Rp. 5.974.087.546. Adapun total penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kapuas untuk periode 2012 hingga 2016 adalah sebesar Rp. 46.216.837.147,32. Gambar 5.5 diatas menyatakan bahwa Penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari retribusi daerah untuk periode tahun 2013 hingga tahun 2016 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 penurunan penerimaan retribusi daerah dari tahun 2012 mencapai 29,73%, untuk tahun 2014 terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah sebanyak 15,58% dari tahun 2013, pada tahun 2015 terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah dari tahun 2014 yaitu sebanyak 25,69% dan pada tahun 2016 kembali terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah sebesar 7,84% dari tahun 2015.

Selama tahun 2012 hingga tahun 2016, retribusi daerah memberikan kontribusi yang bervariasi namun cenderung menurun terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas, Kontribusi retribusi daerah terhadap keuangan daerah selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami penurunan.

Kontribusi tertinggi berada pada tahun 2012, yaitu mencapai 1,46% dan kontribusi terendah adalah pada tahun 2016, yaitu hanya 0,35%.

Hasil uji Koefisien determinan menunjukkan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi yang positif terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 82,8%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cherrya Dhia Wenny, 2011 dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah STIA MDP” dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa retribusi daerah tidak memberikan pengaruh dominan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap keuangan Daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016.

Analisis secara kuantitatif menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari aspek Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi sebesar 87,6% terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas. Sedangkan analisis secara kualitatif menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari aspek Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami turun naik. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Kapuas yang paling tinggi adalah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 3.935.747.315,29, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan Kabupaten Kapuas yang paling rendah adalah pada tahun 2012 yaitu hanya Rp. 2.568.232.109,52 Adapun total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk periode 2012 hingga 2016 adalah sebesar Rp. 15.834.172.081,06. Gambar 5.5 diatas mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari sumber Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Kabupaten Kapuas periode tahun 2012 hingga tahun 2016 selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hanya pada tahun 2014 saja terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi peningkatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 21,24%, kemudian pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 16,77%, pada tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 17,53% dan hanya pada tahun 2013 ke tahun 2014 saja terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 7,90%.

Persentasi realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang tertinggi adalah pada tahun 2013 yaitu mencapai 119,76%, sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2014 yaitu hanya mencapai 95,59% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode tahun 2012 hingga tahun 2016 atau selama 5 (lima) tahun rata-rata realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah 101,97%.

Kontribusi pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap keuangan daerah selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami kenaikan dan kemudian penurunan. Kontribusi tertinggi berada pada tahun 2013, yaitu mencapai 0,28% dan kontribusi terendah adalah pada tahun 2015, yaitu hanya 0,22%.

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memberikan kontribusi yang positif terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 87,6%. Dengan demikian Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga terbukti memberikan pengaruh dominan terhadap Keuangan daerah Kabupaten Kapuas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gusti Made Ayu Aprilianda, 2016 dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur” yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja keuangan.

Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap keuangan Daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016

Analisis secara kuantitatif menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi sebesar 82,8% terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas. Analisis secara kualitatif menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari aspek Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang sah pada tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami fluktuasi atau turun naik. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang sah Kabupaten Kapuas yang paling tinggi adalah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 62.123.052.642,58, sedangkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber Hasil Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang sah Kabupaten Kapuas yang paling rendah adalah pada tahun 2013 yaitu hanya Rp. 223.525.544.039,11 Adapun total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang sah untuk periode 2012 hingga 2016 adalah sebesar Rp.222.328.488.814,60. Selama periode 2012 sampai dengan 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah selalu mengalami kenaikan dan hanya mengalami penurunan yaitu tahun 2013. Pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 15% dari tahun 2012, kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan 105% dari tahun 2013, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 26% dari tahun 2014, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 2% dari tahun 2015.

Persentasi realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari sumber Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang sah yang tertinggi adalah pada tahun 2014 yaitu mencapai 134,10%, sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2016 yaitu hanya mencapai 92,18% dari anggaran yang telah ditetapkan. Persentasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber pada Lain-Lain PAD yang sah mengalami kenaikan pada tahun 2012 hingga tahun 2014, namun

pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan.

Selama tahun 2012 hingga tahun 2016, lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi yang bervariasi namun cenderung menurun terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas.

Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap keuangan daerah selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami turun naik. Kontribusi tertinggi berada pada tahun 2015, yaitu mencapai 4,04% dan kontribusi terendah adalah pada tahun 2013, yaitu hanya 2,09%.

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang sah memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 82,8%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gusti Made Ayu Aprilianda, 2016 dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur” yang menyatakan bahwa PAD lain-lain yang sah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- 1) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari pajak daerah terhadap keuangan daerah kabupaten Kapuas Tahun

2012-2016 sebesar 61,5% yang berarti bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas.

2) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari retribusi daerah terhadap keuangan daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016 sebesar 82,8 % yang berarti bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi yang sangat tinggi di terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas.

3) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap keuangan daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016 sebesar 87,6% yang berarti bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas.

4) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah terhadap keuangan daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016 rata-rata sebesar 82,8% yang berarti bahwa Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas

Saran

1) Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari retribusi daerah, maka yang dapat dilakukan melkukan pendataan ulang mengenai potensi retribusi daerah di Kabupaten Kapuas serta mengadakan sosialisasi mengenai objek retribusi daerah di Kabupaten Kapuas.

- 2) Agar Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat maka pemerinta Kabupaten Kapuas perlu meningkatkan usaha pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara intensif dan aktif.
- 3) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, menggunakan ruang lingkup yang lebih luas sehingga memberikan hasil yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Benny Kalonta, 2013. Analisis Keuangan Daerah Dan Hubungan Kausalitas Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Pemerintah Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah Vol 12, No. 4.
- Bratakusumah dan Solihin, 2014. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cherrya Dhia Wenny, 2011. Analisis Pengaruh Pendapatan Aslu Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah STIA MDP.
- Dominick Salvatore. 2014. Mikroekonomi. Jakarta: Erlangga.

Edy Supriyadi, 2014. *SPSS+Amos: Statistical Data Analysis*, Perangkat Lunak Statistik Mengolah Data Untuk Penelitian. Jakarta: In Media.

Evrintia Dini Putri, 2015. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. [Vol 4, No 2 : Semester Genap 2015/2016](#)

Fred N Kerlinger. 2012. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Universitas Gadjahmada.

Gusti Made Ayu Aprilianda, 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Volume 4, No. 2

Hair et al. 2014. *Multivariate Data Analysis: Diterjemahkan oleh Budiyanto*. Jakarta: Erlangga.

Jaya Kirana, 2015. *Analisis Potensi Keuangan Daerah, Pendekatan Makro*. Yogyakarta: PPPEB UGM.

Josef Riwu Kaho, 2015. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Fak. Sospol - UGM.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Meilen Greri Paseki, 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004 – 2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 14 Nomor 3 – Oktober 2014.

Michael P. Todaro. 2013. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Nasution. 2014. Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara

Ni Nyoman Suryaningsih, 2015. Dampak Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 4.08. ISSN: 2337-3067

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Rosen, 2015. Indikator Kesejahteraan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Sri Mulyani Erlina, 2013. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Medan: USU Press.

Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta.

Swasono, 2015. Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Perkumpulan Pra Karsa.

Thomas, 2015. Pola Dasar pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara